**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan harus dikelola dan sejalan dengan semangat Undang-undang Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta undang-undang dan peraturan lainnya sehingga dalam pelaksanaanya dapat mengantisipasi berbagai permasalahan dalam konteks otonomi daerah seperti dewasa ini sedang kita jalani untuk kepentingan nasional, mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan, perluasan dan pemerataan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pendidikan Nasional Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Untuk mencapai tujuan itu dibentuklah suatu sistem pendidikan nasional Indonesia yang berlandaskan kepada akar budaya dan falsafah bangsa dengan berorientasi kepada persaingan global dalam kemajuan peradaban dunia. Melalui manajemen pendidikan nasional, setiap komponen sistem pendidikan: tenaga, peserta didik, kurikulum, dana, sarana dan prasarana, ditata dalam rangka menghasilkan *output* pendidikan sesuai dengan yang dicita-citakan, penataan unsur-unsur pendidikan itu dilaksanakan dalam kerangka kebijakan-kebijakan pokok strategi pendidikan nasional yaitu pemerataan, peningkatan kualitas, relevansi, efektivitas, dan efisiensi pendidikan dengan mengikutsertakan semua pihak yang terkait dengan pendidikan; pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

Penataan seluruh komponen pendidikan itu diharapkan dapat menjamin yang menghasilkan lulusan pendidikan yang bermutu tinggi. Dalam sebuah kerangka pendidikan sebagai suatu sistem, mutu lulusan ditentukan oleh faktor-faktor: masukan mentah *(raw input),* masukan instrumen *(instrument input),* masukan lingkungan *(environmental input),* dan proses pembelajaran.

Prinsip dalam undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peranserta masyarakat termasuk peningkatan sumber dana pendidikan. Hal tersebut dapat dilakukan secara perorangan, kelompok maupun lembaga dalam pendidikan akan lebih efektif karena langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwamelalui otonomi daerah pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan layanan pendidikan akan semakin mendekati masyarakat yang dilayaninya, hingga akuntabilitas layanan bergeser dari yang lebih berorientasi kepada kepentingan pemerintah pusat kepada akuntabilitas yang lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat secara luas dan terbuka.

Paradigma baru manajemen pendidikan tersebut Mulyasa (2007: 20) dalam buku "Menjadi Kepala Sekolah Profesional" melukiskan fungsi-fungsi pendidikan yang didesentralisasikan ke sekolah seperti tampak pada gambar 1.1 berikut.

* Perencanaan & Evaluasi
* Kurikulum
* Pembelajaran
* Ketenagaan
* Keuangan
* Kepesertadidikan
* Hubungan sekolah-masyarakat
* Iklim sekolah

Proses Belajar Mengajar

Hasil Belajar

**Output**

**Proses**

**Input**

Gambar 1.1 Fungsi-fungsi pendidikan Sumber: (Mulyasa, 2007: 20)

Berkaitan dengan input fungsi-fungsi pendidikan sebagaimana disajikan pada gambar 1.1 ketenagaan kependidikan merupakan unsur pendidikan yang memiliki fungsi penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah *(reward)* dan sangsi *(punishment),* hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja tenaga kependidikan (guru, kepala sekolah, dan non guru) dapat dilakukan oleh sekolah dan daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing, kecuali yang menyangkut imbal jasa (gaji) dan rekrutmen pegawai negeri masih ditangani oleh pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ketenagaan pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas meliputi kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Mulyasa (2007: 24) menjelaskan, "Erat hubungannya antara mutu kepala sekolah dengan berbagai aspek kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, iklim budaya sekolah, dan menurunnya perilaku nakal peserta didik".

Kepemimpinan kepala sekolah profesional dalam pelaksanaannya harus memiliki kemampuan manajerial dan integritas pribadi untuk mewujudkan visi menjadi aksi, serta demokrasi dan transparansi dalam berbagai pengambilan keputusan. Kepemimpinan kepala sekolah dalam menjalankan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berhubungan dengan gaya, perilaku pribadi seorang kepala sekolah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di sekolah.

Isu kepemimpinan kepala sekolah sebagaimana yang dinyatakan Mulyasa (2007:42) bahwa pada umumnya, kepala sekolah di Indonesia belum dikatakan sebagai manajer profesional, karena pengangkatannya tidak didasarkan pada kemampuan dan pendidikan profesional, tetapi lebih pada pengalaman menjadi guru. Faktor menurunnya mutu pendidikan di Indonesia adalah kurangnya profesional para kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di lapangan. Perilaku kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola pendidikan melibatkan beberapa perhatian atau tujuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Perilaku kepemimpinan dalam penelitian ini akan dibahas: perilaku yang berorientasi tugas, berorientasi hubungan dan berorientasi perubahan.

Tenaga kependidikan lainnya adalah pendidik atau guru. Guru dalam menjalankan tugas harus memiliki kompetensi. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan yang tersimpan atau dimiliki oleh personil guru. Pengertian keompetensi menurut Mulyasa (2007:26) sebagai berikut:

"Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme".

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa: "kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan". Kompetensi guru tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi guru berkaitan pula dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki guru sangat berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan salah satunya hasil belajar peserta didik.

Pengembangan peserta didik bagian dari kompetensi guru yang harus dimiliki guru, untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Pengembangan peserta didik dapat dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dalam mengelola sekolah dan guru yang berperan sebagai pembelajar di kelas. Harapan semua itu adalah memperoleh hasil belajar peserta didik yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Hasil belajar sebagaimana yang tersirat dalam Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa “Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar”.

Dengan demikian hasil belajar yang termaktub di dalam permendikbud No. 53 tahun 2015 tersebut adalah capaian hasil pembelajaran selama mengikuti proses pembelajaran pada suatu satuan pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Data hasil belajar peserta didik berupa angka 0-100 untuk aspek-aspek yang dituntut dalam standar kelulusan (SKL) dan standar isi (SI). Data hasil belajar tertera di dalam buku laporan pendidikan (BLP) sebagai laporan hasil belajar seorang peserta didik pada pihak-pihak yang berkempentingan.

Data hasil belajar yang tertera di dalam buku laporan pendidikan (BLP) peserta didik di Kecamatan Tanete Rilau ada dua macam sesuai kurikulum yang diterapkan di sekolah masing-masing. Hal ini berkaitan dengan kebijakan diberlakukannya dua jenis kurikulum sesuai Permendikbud No. 64 Tahun 2015 tentang berlakunya kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Matriks pelaporan hasil belajar kedua kurikulum ini berbeda baik jumlah dan jenis mata pelajaran maupun jenis data hasil belajarnya. Diantara lima SMPN di Kecamatan Tanete Rilau ada dua SMPN yaitu SMPN 2 Tanete Rilau dan SMPN 3 Tanete Rilau sebagai piloting Kurikulum 2013 (Kurtilas) dengan demikian segala aktivitas dan penilaian di SMPN 2 Tanete Rilau berlaku sesuai kurikulum 2013 dan sementara tiga SMPN yang lain masih diberlakukan kurikulum 2006.

Satu hal yang patut menjadi perhatian adalah kecenderungan presentasi output SMPN dari Tanete Rilau sangat kecil yang dapat bersaing masuk pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pavorit baik di Kabupaten Barru maupun di luar kawasan Kabupaten Barru. Data ini diperkuat dari salah seorang guru dari SMAN 1 Barru yang selalu menjadi Panitia Penerimaan Peserta didik Barru (PPDB) di sekolah tersebut. Jumlah SMPN di Kecamatan Tanete Rilau ada lima dan presentasi peserta didik lulusan dari SMPN 2 Tanete Rilau Kecamatan Tenete Rilau yang melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah pavorit dengan alasan hasil belajarnya baik dari hasil Ujian Nasional (UN) maupun hasil tes masuk ke sekolah pavorit masih belum memenuhi standar kelulusan sesuai ketentuan panitia PPDB sekolah tersebut.

Jika pembelajaran di kelas merupakan faktor dominan yang menentukan mutu hasil belajar peserta didik dan mutu pendidikan, maka guru memegang peranan sentral karena gurulah yang merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proses pembelajaran serta menilai hasil belajar peserta didik. Djalil dkk (1997: 28) menyebutkan bahwa: "Guru juga memainkan peran sebagai perancang kurikulum, administrator, sumber informasi yang kreatif, seorang profesional dan agen untuk perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku peserta didik".

Kaitan dengan peran tersebut guru SMPN 2 Tanete Rilau cukup berperan dari segi perancang kurikulum tingkat kabupaten sebagai pendamping dan instruktur implementasi kurikulum 2013 ada untuk tiga mata pelajaran (IPA, IPS, dan BK), sementara dari segi prestasi guru SMPN 2 Tanete Rilau telah meraih juara dua guru prestasi tingkat Kabupaten tahun 2011 (Diknas Pendidikan Kabupaten Barru). Kompetensi guru SMPN 2 Tanete Rilau sebagai aktivis MGMP Kabupaten, Instruktur Nasional guru pembelajar, dan Instruktur Kabupaten implementasi kuriklum 2013 ini membuktikan bahwa guru SMPN 2 Tanete Rilau masih tergolong rata-rata. Peranan guru sebagai administrator, sumber informasi dan profesional dalam bidangnya merupakan gambaran kompetensi guru dan komponen-komponen ini sangat berperan dalam mendukung tugas guru sebagai agen perubahan ke arah yang lebih baik dalam pembentukan manusia yang sesuai tujuan pendidikan.

Kompetensi guru sebagai agen ini harus didukung oleh pimpinan satuan pendidikan dalam hal ini kepala sekolah. Tugas kepala sekolah sebagai pendorong mitranya (guru) untuk selalu mengembangkan kompetensinya maka tentunya akan berdampak pada eratnya kerjasama dalam kemajuan mutu hasil belajar peserta didik. Berdasarkan data dari Diknas Pendidikan Kabupaten Barru bahwa ada dua sekolah di Kecamatan Tanete Rilau yang terbilang baru yakni SMPN 4 Tanete Rilau, SMPN 5 Tanete Rilau. Tentunya kepala sekolah pada satuan pendidikan ini adalah pendatang baru dan baru satu atau dua kali mengadakan penamatan peserta didik. Kepemimpinan kepala sekolah baik yang baru maupun yang lama belum menampakkan hasil belajar peserta didik secara nyata untuk bersaing baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Karena hasil UN dan jumlah peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah pavorit masih di dominasi dari SMPN lain misalnya SMPN 3 Tanete Rilau, SMPN 1 Barru, SMPN 2 Barru dan SMPN lainnya, dan SMPN 2 Tanete Rilau masih jauh tertinggal.

Beberapa pemikiran di atas dapat diambil suatu simpulan bahwa perilaku pemimpinan kepala sekolah dan kompetensi guru merupakan unsur-unsur sistem pendidikan yang berperan pada hasil belajar peserta didik sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan pernyataan permasalahan di atas, maka peneliti bermaksud untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa Hubungan Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kompetensi Guru dengan Hasil belajar Peserta didik (Studi Analisis pada SMP Negeri 2 Tanete Rilau Kabupaten Barru).

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan latar belakang penelitian ini, maka pertanyaan yang dijawab dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan perilaku kepemimpinan kepala sekolah dengan
hasil belajar peserta didik pada SMP Negeri 2 Tanete Rilau Kabupaten Barru?
2. Bagaimanakah hubungan kompetensi guru dengan hasil belajar peserta didik pada SMP Negeri 2 Tanete Rilau Kabupaten Barru?
3. Bagaimanakah hubungan perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi guru dengan hasil belajar peserta didik pada SMP Negeri 2 Tanete Rilau Kabupaten Barru?

 **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah mengetahui secara jelas dan akurat mengenai:

1. Hubungan perilaku kepemimpinan kepala sekolah dengan prestasi belajar peserta didik pada pada SMP Negeri 2 Tanete Rilau Kabupaten Barru.
2. Hubungan kompetensi guru dengan hasil belajar peserta didik pada pada SMP Negeri 2 Tanete Rilau Kabupaten Barru.
3. Hubungan perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi guru dengan hasil belajar peserta didik pada pada SMP Negeri 2 Tanete Rilau Kabupaten Barru.

**D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dilihat dari kegunaan secara teoritis dan secara praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis berkaitan dengan pengujian beberapa landasan teoritis yang digunakan menyangkut masalah hubungan perilaku kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, dan hasil belajar peserta didik berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran dan mutu lulusan di sekolah masing-masing yang dijadikan penelitian.
2. Kegunaan praktis berkaitan dengan hasil penelitian yang diharapkan untuk kepala sekolah, guru, pemerintah, dan masyarakat. a) Bagi kepala sekolah, penelitian ini berguna sebagai bahan intropeksi dan perbaikan diri untuk berperilaku dan bertindak di tempat bekerja; b) Bagi guru, penelitian ini berguna sebagai bahan intropeksi dan perbaikan diri, korps agar profesi yang mulia sebagai guru tetap menjadi profesi yang mulia; c) Bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dan institusi pendidikan lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan tenaga guru, agar kinerja mereka dapat ditingkatkan; dan d) bagi masyarakat, untuk dapat secara bersama-sama berperan serta sesuai kapasitas dan kemampuannya dalam penyelenggaraan pendidikan.